

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepemimpinan adalah salah satu sarana dalam menggerakkan (*Actuating*) dan yang terakhir adalah salah satu fungsi manajemen (*Management*) sehingga wajarlah apabila kepemimpinan itu harus dipelajari oleh para pejabat pimpinan (*Managers*).¹ Hal tersebut juga berlaku untuk seorang Presiden atau kepala negara. Pada hakikatnya, kepala negara sebagai pemimpin tertinggi negeri harus mampu menjalankan amanat yang diberikan oleh rakyat melalui pemerintahan serta kebijakannya.

Kebijakan yang diambil oleh seorang kepala negara akan sangat mempengaruhi kesejahteraan warganya. Hal tersebut dikarenakan oleh adanya kaitan antara seorang pemimpin, kebijakan dan kesejahteraan warganya. Ketika seorang pemimpin atau katakanlah kepala negara mengambil kebijakan yang tidak sesuai atau dirasa kurang baik, maka akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat luas. Tidak heran apabila kemudian banyak pemimpin yang mendapat hujatan dari kalangan masyarakat, sebagai akibat dari ketidakpuasan masyarakat.

Raymond J. Burby menyatakan bahwa “Hubungan pemimpin – pengikut praktis terdapat dimana saja dan dalam apa saja yang kita lakukan.”² Dengan adanya pernyataan tersebut maka dapat dikatakan bahwa seorang pemimpin, baik itu dari

¹ Prof. Dr. S. Pamudji, MPA. *Kepemimpinan Pemerintahan Di Indonesia*. Pt. Bina Aksara, Jakarta, 1986, hal 8.

²*ibid*, Hal 2.

sikap atau kebijakan yang diambilnya akan mempengaruhi siapa saja yang berada dibawahnya. Hubungan Pemimpin – pengikut akan terjadi ketika kepemimpinan itu masih berjalan bahkan selalu terasa dampaknya dikemudian hari.

Kebijakan publik (*Policy making*) sendiri adalah produk dari setiap sistem politik. Dalam sistem politik dan kebijakan terdapat komponen-komponen, diantaranya: Tindakan (*Actions*), Pelaku (*Actors*), dan orientasi nilai (*Value Orientation*). Komponen-komponen tersebut kemudian saling berhubungan dan membentuk pola sebagai berikut: *Input-proses-output-feedback*.³

Kebijakan hanya akan menjadi sebuah dokumen politik apabila tidak diikuti dengan tindakan konkrit, karena kebijakan dirumuskan untuk mengakomodasikan tujuan untuk menciptakan suatu kondisi tertentu. Birokrasi pemerintah hanya akan bertindak apabila ada kebijakan yang telah dilegitimasi.⁴

Menurut *Universal Declaration Of Human Right* (1984) dan *The International Universal Convernant on Economic, Social and Cultural Right* (1966) pangan adalah hak asasi manusia, yang merupakan kebutuhan primer setiap manusia dan tidak bisa tergantikan. Maka tidak heran apabila kemudian pangan sangat mempengaruhi kehidupan manusia, bahkan dapat mempengaruhi semua sektor. Baik itu ekonomi, sosial, politik maupun budaya.⁵

Di indonesia pun, pangan merupakan kebutuhan yang sangat penting. Yang dikatakan sebagai pangan disini tidak cukup hanya bertumpu pada beras saja.

³ Samodra Wibawa. *Kebijakan Publik Proses dan Analisis*. Intermedia, Jakarta, 1994, hal 13.

⁴ *Ibid*, hal 34.

⁵ Ardila Putri. *Skripsi: Sekuritisasi Isu Pangan Di Indonesia Studi Pada Kebijakan Food Estate Pemerintah Republik Indonesia*. Diakses Melalui Repository.Unand.Ac.Id/19833/1/Skripsi%20ardila%20putri.Pdf. Pada Tanggal 20 Juni 2015, Pukul 18.00 Wib, Hal 2.

Palawija, jagung dan beberapa diantaranya pun merupakan tanaman pangan. Dan tidak dapat dipungkiri bahwasannya kebutuhan masyarakat Indonesia akan pangan sangatlah tinggi. Untuk beras saja di tahun 2015, seperti yang dilansir oleh Viva.co.id, tingkat konsumsi rata-rata nasional 124,89 kg beras/kapita/tahun.

Dengan adanya kebijakan desentralisasi, setiap daerah memiliki hak untuk mengelola daerahnya sendiri dengan memanfaatkan setiap potensi yang ada. Dengan berjalannya keadaan seperti itu, maka secara otomatis kebijakan ketahanan pangan dan kebijakan agraria lainnya pun mengalami banyak perubahan. Apalagi jika mengikuti jejak dari setiap persiden yang ada. setiap persiden memiliki cara atau gayanya sendiri untuk menjalankan kebijakan pangan.

Berikut ini adalah sejarah perkembangan kebijakan pangan di Indonesia:

Tabel 1.1 Sejarah Kebijakan Pangan Indonesia Sejak 1952 (Mears 1984, mears and Moeljono 1981 dan berbagai sumber)⁶

Ordo	Rezim Pemerintahan	Kebijakan Pangan	Catatan
Orde Lama	Soekarno 1952-1956	Swasembada beras melalui program kesejahteraan kasimo	1950-1952: BAMA (Yayasan Bahan Makanan) 1953-1952: YUBM (Yayasan Urusan Bahan Makanan)
	Soekarno 1956-1964	Swasembada beras melalui program sentra	1956: YBPP (Yayasan Badan Pembelian Padi)

⁶ Jonatan Lassa. *Politik Ketahanan Pangan Indonesia 1950-2005*. Diakses melalui http://www.zef.de/module/register/media/3ddf_Politik%20Ketahanan%20Pangan%20Indonesia%201950-2005.pdf. Pada tanggal 20 Juli 2015, pukul 13.00 wib.

			<p>1963: Substitution Jagung</p> <p>1964: PP NO.3 – Food Material Board</p> <p>1964: Bimas’ dan “Panca Usaha” Tani</p>
Pemerintahan Transisi			<p>1966: Komando Logistik Nasional (KOLOGNAS)</p> <p>1967: 14/05, Badan urusan logistik (BULOG) didirikan dan berfungsi sebagai pembeli beras tunggal</p>
Orde Baru	Soeharto Repelita 1 & 2 1969-1979	Swasembada Beras	<p>1969: Tambahkan Tugas Bulog: Manajemen Stok penyangga pangan Nasional – dan pembangunan neraca pangan Indonesia sebagai standar Ketahanan Pangan.</p> <p>1971: Tambahkan tugas BULOG sebagai pengimpor gula dan gandum.</p> <p>1973: Lahirnya serikat tani Indonesia</p> <p>1974: Tambahkan Tugas bulog: Pengadaan daging untuk DKI Jakarta dan Penggunaan Revolusi Hijau untuk mencapai swasembada beras</p>

			<p>1977: Tambahkan Tugas Bulog: Kontrol Impor Kacang kedelai.</p> <p>1978: penetapan harga dasar jagung, kedelai, kacang tanah dan kacang hijau.</p>
	Soeharto, Repelita 3 dan 4 1979 – 1989	Swasembada Pangan	<p>1978: Kepres 39 / 1978, pengembalian tugas bulog sebagai kontrol harga untuk gabah, beras, tepung gandum, gula pasir, dll.</p> <p>1984: Mendali dari FAO atas tercapainya sasembada pangan.</p>
	Soeharto, Repelita 5,6,7 1989 – 1998	Swasembada Beras	<p>1995: penganugerahan pegawai bulog sebagai pegawai negeri sipil.</p> <p>1997: perubahan fungsi bulog untuk mengontrol hanya untuk harga beras dan gula pasir.</p> <p>1998: penyempitan peran bulog yang berfungsi sebagai pengontrol harga beras saja.</p>
Reformasi (Transisi)	Habibi 1998/1999	Swasembada Beras	<p>1998/1999: Penjualan pesawat IPTN yang ditukar dengan beras Thailand</p>

	A. Wahis 1999/2000	Swasembada beras	2000: penegasan tugas bulog untuk manajemen logistik beras (Penyediaan distribusi dan kontrol harga)
Reformasi (setelah 2000)	Megawati 200/2004	Swasembada beras	2003: privatisasi bulog 2004: <i>No-option strategy</i> kecuali swasembada beras.
	Susilo Bambang Yudhoyono (2004 – 2009)	“Revitalisasi Pertanian”	2005: Revitalisasi Pertanian adalah komitmen atau janji untuk peningkatan pendapatan pertanian GDP, pembangunan agribisnis yang mampu menyerap tenaga kerja dan swasembada beras, jagung serta palawija.

Sumber: Jonathan Lassa. *Politik Ketahanan Pangan Indonesia 1950-2005 Pdf*.

Berdasarkan tabel diatas, terdapat poin penting bahwa baik Soeharto ataupun Susilo Bambang Yudhoyono memiliki program kebijakan pangannya masing-masing. Mereka memiliki konsep yang sebenarnya hampir sama, meski Soeharto memang lebih memfokuskan kebijakan tersebut kepada beras dan peran Bulog. Namun melalui tabel diatas, pada tahun 1984 Soeharto memiliki catatan penting tentang pemberian medali dari *FAO* karena dinyatakan berhasil melakukan swasembada beras. Hal tersebut membuktikan bahwa Sekalipun Soeharto tidak memiliki *basic* di bidang pertanian, tapi beliau mampu menjalankan kebijakan

pangan dengan baik. Sehingga tidak heran apabila kemudian, perwujudan dari watak, nilai, serta sistemnya begitu membekas.

Pada masa Orde Baru, berkembanglah paradigma FAA (*Food Availability Approach*). Paradigma ini berpandangan bahwa kemampuan dalam menyediakan makanan pokok dalam jumlah besar untuk masyarakat adalah merupakan penentu dari ketahanan pangan. Melalui paradigma inilah kemudian muncul anggapan bahwa dengan tersedianya pasokan pangan, maka penyaluran pangan melalui pedagang akan dapat dilakukan secara efisien dan harga pangan akan tetap stabil.⁷

Untuk melindungi kesejahteraan petani, pemerintah Orde Baru dibawah kepemimpinan Soeharto membentuk KUD dan BUUD. Keduanya terbentuk untuk membeli dan memasarkan beras dalam negeri. Sementara itu, mengenai stabilitas harga, bulog mengatur hal tersebut agar tujuan pemerintah dapat tercapai.⁸ Strategi seperti ini, menurut penulis memang cocok untuk diterapkan mengingat adanya kesulitan bagi para petani untuk dapat bersaing dengan produk luar negeri. ketika pemerintah membantu untuk membeli dan memasarkannya kembali, maka perputaran beras akan sangat menguntungkan baik bagi para petani atau pun pemerintah sendiri.

Mantan menteri Pertanian Anton Apriyantono (2004-2009) mengakui keunggulan program ketahanan pangan pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto. Menurutnya beliau telah meletakkan dasar-dasar pembangunan pertanian

⁷ Hambali. *Perbandingan Hubungan Negara-Pasar Rezim Soeharto Dan Pemerintahan Sby. Kajian dari Perspektif Weberian-Kintzean*. Diakses melalui jurnal.yudharta.ac.id/wp-content/uploads/2013/.../Jurnal-pak-hambali.pdf, pada tanggal 20 juli 2015, pukul 14.00 wib. Hal 19

⁸ *Ibid.* Hal 19

yang benar serta banyak program-programnya yang pada saat itu dilanjutkan olehnya. Salah satu infrastruktur yang dianggap sangat berpengaruh bagi pertanian adalah infrastruktur perbenihan, pengamatan dan pengendalian hama yang dibangun oleh Soeharto. Selain Anton Apriyantono, Mantan Menteri Pertanian Pro. Bungaran Saragih (2001-2004) juga mengatakan bahwa pak Harto telah menempatkan upaya memenuhi kebutuhan pangan pokok tanpa harus impor, sebagai fokus pembangunan dimasa pemerintahannya.⁹

Seperti yang ditulis dalam Jurnal Diplomasi Vol. 3 No. 3 September 2011, Pusdiklat Kementerian Luar Negeri RI, Indonesia melalui program Swasembada berasnya dikenal sebagai negara agraria pengimpor beras terbesar pada tahun 1966 dan mampu mencukupi kebutuhan pangan didalam negeri melalui swasembada beras yang dilakukan pada tahun 1984. Perbedaan yang signifikan terlihat jelas sejak tahun 1969 yang hanya mampu menghasilkan 12,2 juta ton beras menjadi 25,8 juta ton beras pada tahun 1984. Kesuksesan tersebutlah yang kemudian membawa Presiden Soeharto terlibat dalam konferensi ke-23 FAO, PADA 14 November 1985.¹⁰

Hal tersebutlah yang kemudian membentuk pola pikir tersendiri dikalangan masyarakat Indonesia, terutama masyarakat yang mengalami serta menyaksikan secara langsung bagaimana keterlibatan Soeharto dalam menentukan kebijakan pangan Indonesia. Masyarakat menganggap bahwa masa Pemerintahan Soeharto

⁹ <http://soeharto.co/program-pertanian-era-pak-harto> Pak Harto dan Ketahanan Pangan. Di akses pada tanggal 20 Juni 2015, Pukul 19.00 wib.

¹⁰ *Sumber:* <http://soeharto.co/program-pertanian-era-pak-harto> Pak Harto dan Ketahanan Pangan. Di akses pada tanggal 20 Juni 2015, Pukul 19.00 wib.

merupakan masa terbaik bagi kebijakan pangan Indonesia. Ketersediaan pangan untuk masyarakat Indonesia sangat tercukupi bahkan sampai menjadi negara berswasembada beras. Padahal Soeharto sendiri adalah seseorang dengan latar belakang Militer, bukanlah seorang yang memiliki latar belakang pertanian. Dapat dikatakan Soeharto adalah ‘orang asing’ bagi dunia pangan atau bidang agraria itu sendiri.

Berbeda dengan Soeharto, seperti yang dilansir oleh Liputan 6, dikatakan bahwa pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono dianggap gagal dalam program swasembada lima komoditas pangan yang terdiri dari beras, jagung, gula, kedelai dan daging sapi. Pengamat pertanian Khudori mengatakan, target surplus beras yang ingin dicapai pada tahun 2014 adalah 10 ton tetapi pada kenyataannya hanya tercapai sebanyak 2 ton. Kemudian, Ia juga mengatakan bahwa telah terjadi ketimpangan antara produksi dalam negeri dengan permintaan, sehingga pemerintah harus melakukan impor yang cukup besar demi memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Pada kenyataannya, selama masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yodhoyono, belum ada prestasi terkait sektor pertanian.¹¹

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa Susilo Bambang Yudhoyono gagal dalam melaksanakan Program Kebijakan Pangan berupa Swasembada Pangan. Padahal jika ditelaah kembali, latar belakang pendidikan Susilo Bambang Yudhoyono adalah di bidang Pertanian. Susilo Bambang Yudhoyono menyelesaikan gelar Doktornya di Institut Pertanian Bogor (IPB). Hal

¹¹ Sumber didapatkan melalui <http://bisnis.liputan6.com/read/2119611/pemerintahan-sby-dinilai-gagal-capai-swasembada-pangan>. Diakses pada tanggal 20 juni 2015 pukul 14.00 WIB.

tersebutlah yang kemudian membangkitkan rasa penasaran penulis, tentang mengapa seseorang dengan latar belakang pertanian dianggap tidak sukses dalam mengaplikasikan kebijakan pangan.

Penelitian ini diharapkan mampu memperlihatkan bagaimana Strategi Soeharto dalam melaksanakan kebijakan pangan secara sukses. Selain itu, hal apakah yang kemudian menjadi penghalang bagi Susilo Bambang Yudhoyono yang notabene adalah seseorang yang *ekspert* di bidang pertanian harus mengakui kegagalannya dalam pelaksanaan swasembada pangan. Lalu, melalui penelitian ini kita dapat melihat apakah kepemimpinan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kebijakan yang di ambil oleh keduanya. Fokus dari penelitian ini adalah perbandingan politik pangan pada masa kepemimpinan Soeharto dengan Masa Pemerintaha Susilo Bambang Yodhoyono.

Soeharto dan Susilo Bambang Yudhoyono merupakan mantan presiden Indonesia yang menjabat lebih dari satu kali periode kepemimpinan. Sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil dari setiap periodenya akan sangat menarik untuk dikaji, salah satunya adalah dalam hal kebijakan pangan. Soeharto dan Susilo Bambang Yudhoyono memiliki latar belakang militer, akan tetapi keduanya memiliki pemikiran bahwa pangan merupakan sesuatu yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup masyarakat indonesia. Susilo Bambang Yudhoyono sendiri memiliki latar belakang pendidikan pertanian, namun pada kenyataannya beberapa fakta menyebutkan bahwa Soeharto dianggap lebih sukses dalam menjalankan kebijakan pangan.

Pemikiran Soeharto dan Susilo Bambang Yudhoyono mengenai pangan, pasti mempengaruhi bagaimana suatu kebijakan pangan diambil dan dijalankan. Karena pada dasarnya, pemikiran politik akan selalu bersangkut paut dengan kekuasaan dan kepemimpinan seseorang, terhadap suatu kebijakan. Oleh karena itu, penulis merasa hal tersebut sangat menarik untuk diteliti.

B. Rumusan Masalah

Melalui latar belakang diatas, maka terdapat beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan. Permasalahan tersebut, diantaranya adalah:

1. Bagaimanakah perbandingan strategi politik pangan pada masa kepemimpinan Soeharto dan Susilo Bambang Yudhoyono?
2. Bagaimanakah pengaruh kepemimpinan Soeharto dan Susilo Bambang Yudhoyono dalam kebijakan pangan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perbandingan strategi politik pangan pada masa kepemimpinan Soeharto dan Susilo Bambang Yudhoyono.
2. Untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan Soeharto dan Susilo Bambang Yudhoyono dalam kebijakan pangan.

D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan ilmu di masa mendatang. Peneliti selanjutnya dapat menjadikan penelitian ini sebagai langkah awal dalam melakukan penelitian
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah Indonesia dalam melaksanakan kebijakan pangan, sehingga dapat mensejahterakan masyarakat Indonesia.

E. Kerangka Dasar Teori

1. Kebijakan Publik

a. Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Thomas R. Dye, *Public policy is whatever government choose to do or not to do.*¹² Artinya kebijakan pemerintah adalah apapun yang dipilih pemerintah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.

Sedangkan menurut Amir Santoso, kebijakan publik adalah pendapat para ahli yang menyamakan kebijaksanaan publik dengan tindakan-tindakan pemerintah. Mereka cenderung untuk menganggap bahwa semua tindakan pemerintah dapat disebut sebagai kebijaksanaan publik.¹³

Sedangkan Bridgman dan davis (2004) mengatakan bahwa “*kebijakan publik setidaknya mencakup: 1). Bidang kegiatan sebagai*

¹² Thomas R. Dye. *Understanding Public Policy*. Englewood Cliffs of Prentice Hall, New Jearsey, 1981, hal. 1.

¹³ Ahidca Fitra G. *Kebijakan Publik*. Diakses Melalui Elisa1.Ugm.Ac.Id/Files/.../Ahidcha%20-%20kebijakan%20publik.Pdf. Pada Tanggal 12 September 2015, Pukul 15.32.

ekspresi dari tujuan umum atau pernyataan-pernyataan yang ingin dicapai. 2). Proposal tertentu yang mencerminkan keputusan-keputusan pemerintah yang telah dipilih. 3). Kewenangan formal seperti undang-undang atau peraturan pemerintah. 4). Program, yakni seperangkat kegiatan yang mencakup rencana penggunaan sumberdaya lembaga dan strategi pencapaian tujuan. 5). Keluaran (output), yaitu apa yang nyata telah disediakan oleh pemerintah, sebagai prodeuk dari kegiatan tertentu.¹⁴

Kemudian menurut David Easton, menyatakan bahwa: “*The Autorative Allocation Of Values The Whole Society.*”¹⁵ Melalui pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa hanya orang yang memiliki otoritas lah yang kemudian dapat melakukan sesuatu terhadap masyarakat. Pemerintah dikatakan masuk kedalam urusan sistem politik yang dapat mengikat masyarakat di masa mendatang.

b. Tahap-tahap kebijakan Publik

Menurut William Dunn, terdapat beberapa tahap dalam pembuatan kebijakan. Antara lain:¹⁶

TABEL 1.2

TAHAP-TAHAP KEBIJAKAN PUBLIK

FASE	KARAKTERISTIK	ILUSTRASI
PENYUSUNAN AGENDA	Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Banyak masalah tidak disentuh dama sekali, sementara lainnya	Legislator negara dan kosponsornya menyiapkan rancangan undang-undang mengirimkan ke komisi kesehatan dan kesejahteraan untuk dipelajari dan disetujui.

¹⁴ A. Syamsu Alam. *Analisis Kebijakan Publik Kebijakan Sosial di Perkotaan Sebagai Sebuah Kajian Implementatif*. Diakses melalui repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/.../Jurnal-06.pdf. pada tanggal 30 Agustus 2015, pukul 20.00 wib.

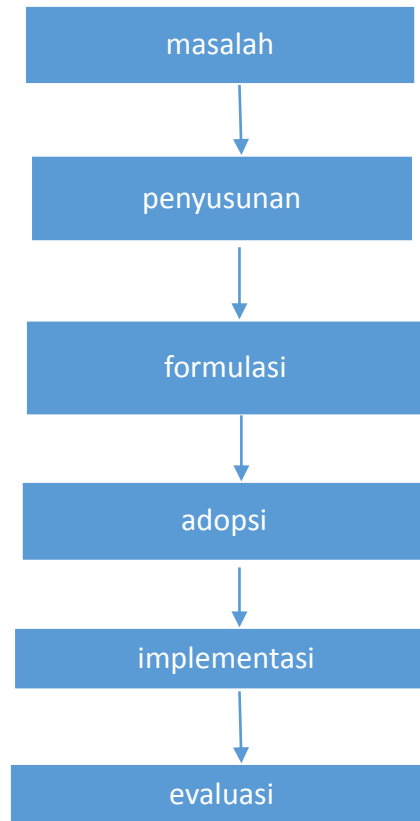
¹⁵ J Ageng Purwo. Diakses Melalui Eprints.Uny.Ac.Id/8530/3/BAB%20%20-%2007401241045.Pdf. Pada Tanggal 12 September 2015, Pukul 19.45 Wib.

¹⁶ William N. Dunn. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2003, hal 24-25.

	ditunda untuk waktu lama	Rancangan berhenti di komite dan tidak terpilih.
FORMULASI KEBIJAKAN	Para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah. Alternatif kebijakan melihat perlunya membuat perintah eksekutif, keputusan peradilan, dan tindakan legaslitaf.	Peradilan negara bagian mempertimbangkan pelarangan penggunaan tes kemampuan standar seperti SAT dengan alasan bahwa tes tersebut cenderung bias terhadap perempuan dan minoritas.
ADOPSI KEBIJAKAN	Alternatif kebijakan yang diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus diantara direktur lembaga, atau keputusan peradilan.	Dalam keputusan Mahkamah Agung pada kasus <i>Roe. V. Wade</i> tercapai keputusan mayoritas bahwa wanita mempunyai hak untuk mengakhiri kehamilan melalui aborsi.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN	Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia.	Bagian keuangan Kota mengangkat pegawai untuk mendukung peraturan baru tentang penarikan pajak kepada rumah sakit yang tidak lagi memiliki status pengecualian pajak.
PENILAIAN KEBIJAKAN	Unit-unit pemeriksaan dan akuntansi dalam pemerintahan menentukan apakah badan-badan eksekutif, legislatif, dan peradilan memenuhi persyaratan undang-undang dalam pembuatan kebijakan dan pencapaian tujuan.	Kantor akuntansi publik memantau program-program kesejahteraan sosial seperti bantuan untuk keluarga dengan anak tanggungan (AFDC) untuk menentukan luasnya penyimpangan/koruspi.

Sumber: William N. Dunn. Pengantar Analisis Kebijakan Publik.

Gambar 1.1 Tahapan Kebijakan Publik



2. Politik Kebijakan

a. Pangan

Pada peletakan batu pertama gedung Fakultas Pertanian, Universitas Indonesia di Bogor tanggal 27 April 1952, presiden Soekarno mengemukakan hal yang menunjukkan bahwa pangan bukan hanya sekedar yang kita makan. Pangan memiliki dimensi yang sangat luas dan sangat kompleks, menyangkut berbagai hal berkenaan dengan pengelolaan produksi pangan dan pengelolaan konsumsi, distribusi, pemasaran dan cadangan pangan. Pembangunan sistem ketahanan pangan (*Food Security*) yang kokoh perlu menjadi salah satu prioritas ke depan,

karena sejarah membuktikan bahwa ketahanan pangan berkaitan erat dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi serta ketahanan nasional (*national security*) secara keseluruhan.¹⁷

Menurut Undang-undang No 18 tahun 2012 tentang pangan, Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Pangan adalah sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

b. Asas Penyelenggaraan Pangan

Dalam penyelenggaraan pangan, terdapat beberapa asas yang digunakan.

Diantaranya adalah:

- 1) Kedaulatan
- 2) Kemandirian
- 3) Ketahanan
- 4) Keamanan

¹⁷ Sunyoto Usman. *Politik Pangan*. CIRED (Center For Indonesian Research and Development), Yogyakarta, 2004, hal. vii.

- 5) Manfaat
- 6) Pemerataan
- 7) Berkelanjutan
- 8) Keadilan

c. Tujuan Penyelenggaraan Pangan

Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, setidaknya terdapat delapan tujuan penyelenggaraan pangan. Diantaranya adalah:

- 1) Meningkatkan kemampuan memproduksi pangan secara mandiri.
- 2) Menyediakan pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi konsumsi masyarakat.
- 3) Mewujudkan tingkat kecukupan pangan, terutama pangan pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- 4) Mempermudah atau meningkatkan akses pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan pangan dan gizi
- 5) Meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas pangan di pasar dalam dan luar negeri.
- 6) Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi konsumsi masyarakat.
- 7) Meningkatkan kesejahteraan bagi petani, nelayan, pembudi daya ikan, dan pelaku usaha pangan.

- 8) Melindungi dan mengembangkan kekayaan sumber daya pangan nasional.

d. Lingkup Pengaturan Penyelenggaraan Pangan

Terdapat sebelas lingkup pengaturan penyelenggaraan pangan, antara lain:

- 1) Perencanaan pangan
- 2) Keterjangkauan pangan
- 3) Konsumsi pangan dan gizi
- 4) Keamanan pangan
- 5) Label dan iklan pangan
- 6) Pengawasan
- 7) Sistem informasi pangan
- 8) Penelitian dan pengembangan pangan
- 9) Kelembagaan pangan
- 10) Peran serta masyarakat
- 11) Penyidikan

3. Kebijakan Pangan

Politik pangan adalah kebijakan politik yang diarahkan guna terciptanya pemenuhan pangan bagi masyarakat dalam konteks negara. Pangan merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama seperti yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah No. 68 tentang ketahanan pangan. Dalam undang-undang tersebut pemerintah menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan.

Sementara masyarakat menyelenggarakan proses produksi atau penyediaan, perdagangan, distribusi serta berperan sebagai konsumen yang berhak memperoleh pangan yang cukup dalam jumlah dan mutu, aman, bergizi, beragam, terjangkau oleh daya beli masyarakat.¹⁸

Politik pangan merupakan komitmen pemerintah yang ditujukan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional yang berbasis kedaulatan pangan dan kemandirian pangan.¹⁹ Istilah pangan sendiri terdiri dari:

- a. Kedaulatan pangan, yaitu hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal
- b. Kemandirian pangan, adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.
- c. Ketahanan Pangan, adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi,

¹⁸ Erwien Ikhsan. *Skripsi: Politik Pangan Di Maluku (Studi Kasus: Kebijakan Tentang Ketahanan Pangan Lokal Di Maluku)*, hal. 26. Diakses melalui repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/.../SKRIPSI%20ERWIN.doc?...1. Pada tanggal 15 Oktober 2015, pukul 18.14 wib.

¹⁹ Politik Pangan Indonesia-ketahanan Pangan Berbasis Kedaulatan Dan Kemandirian. Diakses melalui www.bkpd.jabarprov.go.id. Pada tanggal 15 Oktober 2015 pukul 19.00 wib.

merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

- d. Keamanan pangan, adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

Haryadi (2011) mengatakan terdapat adanya perbedaan indikator antara ketahanan Pangan, Kemandirian Pangan dan Kedaulatan Pangan. Perbandingan tersebut dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:²⁰

TABEL 1.3
Perbandingan Indikator Ketahanan Pangan, Kemandirian Pangan dan Kedaulatan Pangan

	Ketahanan Pangan	Kemandirian Pangan	Kedaulatan Pangan
Definisi	Kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.	Kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin kebutuhan pangan yang cukup ditingkat rumah tangga, baik	Hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, menjamin hak atas panga rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya

²⁰ Purwiyatno Hariyadi. *Riset Dan Teknologi Pendukung Peningkatan Kedaulatan Pangan*. Jurnal Diplomasi Vol. 3 No. 3, september 2011, hal. 93.

		dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau.	untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal/
Indikator Ketersediaan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> - Kecukupan jumlah - Kecukupan mutu - Kecukupan gizi - Keamanan 	<ul style="list-style-type: none"> - Kecukupan jumlah - Kecukupan mutu - Kecukupan gizi - Keamanan 	<ul style="list-style-type: none"> - Kecukupan jumlah - Kecukupan mutu - Kecukupan gizi - Keamanan
Indikator Keterjangkauan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> - Keterjangkauan fisik - Kesesuaian dengan preferensi 	<ul style="list-style-type: none"> - Keterjangkauan fisik - Kesesuaian dengan preferensi - Kesesuaian kebiasaan dan budaya - Kesesuaian dengan kepercayaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Keterjangkauan fisik - Kesesuaian dengan preferensi - Kesesuaian kebiasaan dan budaya - Kesesuaian dengan kepercayaan
Indikator Konsumsi Pangan	<ul style="list-style-type: none"> - Kecukupan asupan (<i>intake</i>) - Kualitas pengolahan pangan - Kualitas sanitasi dan <i>hygiene</i> - Kualitas air - Kualitas pengasuhan anak 	<ul style="list-style-type: none"> - Kecukupan asupan (<i>intake</i>) - Kualitas pengolahan pangan - Kualitas sanitasi dan <i>hygiene</i> - Kualitas air - Kualitas pengasuhan anak 	<ul style="list-style-type: none"> - Kecukupan asupan (<i>intake</i>) - Kualitas pengolahan pangan - Kualitas sanitasi dan <i>hygiene</i> - Kualitas air - Kualitas pengasuhan anak
Indikator Kemandirian		<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat ketergantungan impor pangan - Tingkat ketergantungan impor sarana produksi pangan (benih, 	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat ketergantungan impor pangan - Tingkat ketergantungan impor sarana

		pupuk, <i>ingredient</i> , pengemas, mesing,dll)	produksi pangan (benih, pupuk, <i>ingredient</i> , pengemas, mesing,dll
Indikator Kedaulatan			<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat keaneka-ragaman sumberdaya pangan lokal - Tingkat partisipasi masyarakat dalam sistem pangan - Tingkat degradasi mutu lingkungan - Tingkat kesejahteraan masyarakat petani, nelayan, dan peternak.

Sumber: Purwiyatno Hariyadi. Riset Dan Teknologi Pendukung Peningkatan Kedaulatan Pangan Jurnal (2011).

4. Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan adalah pilihan politik ditingkat global dan nasional, tetapi merupakan persoalan hidup atau mati di tingkat lokal dan keluarga. Ketahanan pangan terkait dengan pembuatan keputusan-keputusan politik yang benar dalam kerangka pembangunan nasional yang

memadukan pembangunan pedesaan, peran serta (partisipasi) sejati masyarakat, dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.²¹

Ketahanan pangan diartikan secara luas adalah *access for all people at all time to enough food for an active and healthy life*. Maknanya adalah tiap orang setiap saat memiliki akses secara fisik dan ekonomi terhadap pangan yang cukup agar hidup sehat dan produktif.²²

Ketahanan pangan terdiri dari tiga subsistem yaitu ketersediaan pangan (*Food availability*), aspek keterjangkauan (*access supplies*), penyerapan pangan (*food utilization*), sedangkan status gizi (*nutritional status*) merupakan outcome dari ketahanan pangan. Faktor-faktor struktur sosial, budaya, politik, dan ekonomi sangat penting dalam menentukan ketahanan pangan.

Pengembangan ketahanan pangan mempunyai perspektif pembangunan yang sangat mendasar karena:²³

- a. Akses terhadap pangan dengan gizi seimbang bagi segenap rakyat Indonesia merupakan hak yang paling azasi bagi manusia.
- b. Keberhasilan dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia sangat ditentukan oleh keberhasilan pemenuhan kecukupan dan konsumsi pangan dan gizi.

²¹ Hira Jhamtani. *Lumbung Pangan Menata Ulang Kebijakan Pangan*. Insist Press. Yogyakarta. 2008, hal. 115.

²² Dr. Ir. Hermen Malik, M.Sc. *Melepas Perangkap Impor Pangan Model Pembangunan Kedaulatan Pangan Di Kabupaten Kalur, Bengkulu*. LP3ES, Jakarta, 2014, hal. 56.

²³ *Ibid*, hal 60.

- c. Ketahanan pangan merupakan basis atau pilar utama dalam mewujudkan ketahanan ekonomi dan ketahanan nasional yang berkelanjutan.

Subsistem utama ketahanan pangan adalah ketersediaan pangan, distribusi pangan dan konsumsi pangan.²⁴

- a. Subsistem ketersediaan pangan mencakup aspek produksi, cadangan serta keseimbangan antara impor dan ekspor pangan.
- b. Subsistem distribusi pangan mencakup aspek aksesibilitas secara fisik dan ekonomi atas pangan secara merata.
- c. Subsistem konsumsi pangan menyangkut upaya peningkatan pengetahuan dan kemampuan masyarakat agar mempunyai pemahaman atas pangan gizi dan kesehatan yang baik, sehingga dapat mengelola konsumsinya secara optimal.

Pada masa orde baru, dengan dukungan negara-negara asing, pemerintah berhasil mencukupi kebutuhan pangan, sekaligus mampu mengatasi masalah inflasi. Keberhasilan itu dilanjutkan dengan upaya menetapkan *self sufficiency* pangan yang dibarengi dengan mengontrol kehidupan politik secara ketat. Pemerintah orde baru memang dibangun dan dikembangkan atas dasar mekanisme *carrot and sticks*, dengan keyakinan bahwa konflik politik yang tajam ketika itu hanya dapat diredakan melalui ketersediaan, kecukupan dan keterjangkauan pangan. Dengan kata lain,

²⁴ *Ibid*, hal 60-61.

pangan ditempatkan sebagai variabel yang amat determinan untuk menjaga stabilitas politik.²⁵

Sejak awal orde baru, kebijakan ketahanan pangan didasarkan pada paradigma ortodoks, yaitu pendekatan penyediaan pangan (*food availability approach = FAA*), yang berpandangan bahwa suatu negara ditentukan oleh kemampuannya dalam menyediakan makanan pokok dalam jumlah yang cukup bagi seluruh penduduknya.²⁶ Dengan kata lain, kerangka pikir yang dianut pemerintah dalam kebijakan ketahanan pangan adalah:²⁷

- a. Harga yang terjangkau dan stabil cukup untuk menjamin bahwa semua konsumen akan dapat memperoleh makanan yang cukup sesuai dengan kebutuhan hidupnya.
- b. Tingkat harga di tingkat konsumen merupakan refleksi dari kecukup-sediaan pangan.
- c. Stabilisasi harga beras pada tingkat yang terjangkau cukup untuk menjamin ketahanan pangan.
- d. Produksi domestik merupakan sumber pengadaan yang paling handal untuk menjamin kecukup-sediaan pangan.

²⁵ Sunyoto Usman. *Politik Pangan*. CIRED (Center For Indonesian Research and Development), Yogyakarta, 2004, hal.3.

²⁶ Pantjar Simatupang. *Analisis Kritis Terhadap Paradigma Dan Kerangka Dasar Kebijakan Ketahanan Pangan Nasional. A Critical Review On Paradigm And Framework Of National Food Security Policy*. Hal.2. Diakses melalui [Diakses melalui pse.litbang.pertanian.go.id/ind/pdf/files/FAE25-1a.pdf](http://pse.litbang.pertanian.go.id/ind/pdf/files/FAE25-1a.pdf), pada tanggal 19 oktober 2015 pukul 05.00 wib.

²⁷ *Ibid.* Hal 3.

- e. Swasembada pangan merupakan strategi yang paling efektif untuk kebijakan ketahanan pangan dalam jangka panjang.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menciptakan ketahanan, keterdesiaan, keterjangkauan dan distribusi pangan adalah:²⁸

- a. Komitmen pemerintah daerah terhadap diversifikasi pangan, pengolahan pangan dan kultur pangan.
- b. Di daerah perlu dibentuk forum pangan.
- c. Perlu dipikirkan alokasi dana untuk mendukung program-program yang terkait dengan upaya diversifikasi pangan, penolahan pangan dan perubahan kultur pangan.
- d. Dipersiapkan sumber daya manusia yang dapat mendukung program-program yang terkait dengan upaya diversifikasi pangan, pengolahan pangan dan perubahan kultur pangan.

Perubahan pola dan struktur perdagangan komoditas pangan global tidak dapat dilepaskan dari tiga faktor penting, yaitu:²⁹

- a. Fenomena perubahan iklim yang mengacaukan ramalan produksi pangan strategis
- b. Peningkatan permintaan komoditas pangan karena konversi terhadap biofuel

²⁸ Sunyoto Usman. *Opcit*, hal. 15 – 17.

²⁹ Sumber didapat dari: Dewan Ketahanan Pangan Jakarta. Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2010-2014. Draft ke 3, Oktober 2009.

- c. Aksi para investor (spekulasi) global karena kondisi pasar keuangan yang tidak menentu.

Sejarah pembangunan pertanian di Indonesia menunjukkan bahwa peningkatan produktivitas tanaman pangan melalui varietas unggul, lonjakan produksi peternakan dan perikanan telah terbukti mampu mengatasi persoalan kelaparan dalam tiga dasa warsa. Peningkatan produktivitas dan perbaikan pendapatan petani telah berkontribusi pada perbaikan ekonomi pedesaan, sehingga akses dan daya beli terhadap bahan pangan juga meningkat. Dalam konteks ini, penganekaragaman pangan pun berlangsung cukup baik sehingga kualitas dan pemenuhan gizi seimbang juga lebih terjamin. Cukup banyak strategi pengentasan kemiskinan telah mengedepankan aspek penyediaan pangan, akses terhadap bahan pangan, baru kemudian memfokuskan pada stabilitas harga pangan atau strategi pembangunan jangka panjang lainnya.³⁰

Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, kebijakan pemerintah Indonesia di bidang pangan dilakukan melalui strategi lima-pilar, yaitu:³¹

- a. Pengembangan dan rehabilitasi infrastruktur pertanian,
- b. Pemberdayaan petani
- c. Revitalisasi kegiatan industri jasa terkait dengan pertanian,

³⁰ Ibid, hal 48.

³¹ Ade Petranto. *Peran Diplomasi Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan*. Jurnal Diplomasi Vol. 3 NO.3 September 2011, hal. 25.

- d. Memperbaiki akses bagi para petani untuk memperoleh fasilitas pendanaan usaha, dan
- e. Memperbaiki akses pasar bagi produk-produk pertanian

Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, meningkatkan produksi pangan, maka terdapat beberapa kebijaksanaan yang diambil. Kebijaksanaan tersebut meliputi:³²

- a. Peningkatan Produksi Untuk Mencapai Swasembada Pangan
- b. Kebijaksanaan Bidang Perbenihan
- c. Sarana Produksi, Pupuk dan Pestisida
- d. Kebijaksanaan Bidang Prekreditan
- e. Kebijaksanaan Bidang Pengairan
- f. Kebijaksanaan Diversifikasi Usaha tani
- g. Kebijaksanaan Bidang Penyuluhan
- h. Kebijaksanaan Penanganan Pasca Panen

Pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto, dikenallah kebijakan pangan dengan nama Swasembada beras. Kebutuhan Indonesia yang sangat besar akan beras, membuat Soeharto berpikir untuk membentuk kebijakan tersebut. Dalam hal ini, BULOG (Badan Urusan Logistik) mengatur secara langsung mengenai pangan Indonesia. Swasembada beras sendiri adalah suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan beras Indonesia oleh produksi beras Indonesia sendiri.

³² Bustanil Arifin. *Pangan Dalam Orde Baru*. Koperasi Jasa Informasi (KOPINFO), Jakarta, 1994, 194-200.

Melalui rumusan tujuan kebijaksanaan pangan dari Repelita ke Repelita pada masa pemerintahan Soeharto, maka terdapat empat sasaran pokok, yaitu:³³

- a. Penyediaan pangan pada jumlah yang cukup
- b. Harga yang layak/terjangkau oleh konsumen
- c. Harga yang layak/merangsang bagi produsen
- d. Perbaikan keadaan gizi rakyat.

F. Definisi Konseptual

Untuk melihat definisi Konsep dan Operasional lebih jelas, penulis menyuguhkan dalam bentuk tabel berikut:

Tabel 1.4
Definisi Konseptual

No	Definisi Konseptual	Definisi Operasional	Instrumen
A	Kepemimpinan Soeharto	Stategi Kebijakan	To do: <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Produksi untuk mencapai swasembada pangan - Kebijakan bidang perbenihan - Sarana produksi, pupuk dan pestisida - Kebijakan bidang perkreditan - Kebijakan bidang pengairan - Kebijakan diversifikasi usaha tani

³³ Ibid, hal. 244-245.

			<ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan bidang penyuluhan - Kebijakan penanganan pasca panen - Melakukan Revolusi hijau <p>Not to do:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat tidak diijinkan ikut campur dalam hal kebijakan pangan, seluruhnya di pegang pemerintah. - Jenis pangan yang lain tidak terlalu diperhatikan. Beras pada masa ini seolah menjadi satu-satunya pangan.
		Pengaruh	<p>Positif:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Revolusi hijau yang dijalankan berhasil meningkatkan produksi pangan nasional - Menyelamatkan indonesia dari krisis pangan - Mampu menggerakkan petani indonesia dalam pertanian <p>Negatif:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sekalipun dilaksanakan revolusi hijau, kemiskinan petani masih mencolok - Ketergantungan terhadap beras - Kebijakan diskriminatif menyebabkan keterpurukan ketahanan pangan hingga saat ini

			<ul style="list-style-type: none"> - Beras menjadi barometer utama pembangunan sekaligus berfungsi sebagai alat politik. - Swasembada beras tidak bertahan lama
B	Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono	Strategi Kebijakan	<p>To do:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan dan rehabilitasi infrastruktur pertanian - Pemberdayaan petani - Revitalisasi kegiatan industri jasa terkait dengan pertanian - Memperbaiki akses bagi para petani untuk memperoleh fasilitas pendanaan usaha - Memperbaiki akses pasar bagi produk-produk pertanian <p>Not to do:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kebijaksanaan harga beras tidak berorientasi kepada proteksi konsumen tetapi kepada stabilitas ekonomi dan laju inflasi - Tidak membuat sistem irigasi yang terstruktur - Proses produksi tidak dilakukan secara efisien - Lebih berpihak kepada insudtrialisasi sehingga lahan pertanian semakin berkurang
		Pengaruh	<p>Positif:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya pembaruan agraria sebagai program nasional. - Adanya upaya BPN untuk menjalin

			<p>kerjasama dengan organisasi petani</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terjadinya peningkatan produksi padi secara bertahap sehingga Indonesia menyatakan swasembada beras <p>Negatif:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Swasembada dan ketahanan berbasis impor - Rendahnya kesejahteraan petani - Kondisi obyektif naiknya terus sejumlah harga kebutuhan pangan, utamanya hasil pertanian seperti beras, gula, dan kedelai. - Kedudukan pulau Jawa sebagai penghasil padi merosot dikarenakan industrialisasi
--	--	--	--

G. Metode Penelitian

*“Research is a systematic process of collecting, analyzing, and interpreting information (data) in order to increase our understanding of a phenomenon about which we are interested or concerned.”*³⁴ Dengan kata lain, penelitian adalah suatu proses sistematis yang mencoba untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan informasi yang ada, sehingga mampu meningkatkan pemahaman kita akan fenomena yang menarik atau menjadi perhatian kita. Oleh karena itu, di dalam sebuah penelitian dibutuhkan apa yang kemudian disebut dengan metode

³⁴ Paul D. Leedy and Jeanne E. Ormrod. *Practical Research Planning And Design*. Pearson Education International, USA, 2010, hal 2.

peelitian, untuk mempermudah proses pengumpulan, analisis dan penafsiran tersebut.

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa point yang akan dijelaskan penulis, yaitu Jenis penelitian, jenis dan sumber data, Unit analisis data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti tentang perbandingan politikan pada masa kepemimpinan masa pemerintahan Soeharto dan Susilo Bambang Yudhoyono. Untuk penelitian ini, penulis telah merancang jenis penelitian yang pantas digunakan. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah Kualitatif dengan metode penelitian sejarah.

Menurut Sjamsuddin dan Ismaun, metode sejarah adalah proses menguji dan mengkaji kebenaran dan peninggalan-peninggalan masa lampau dengan menganalisis secara kritis bukti-bukti dan data-data yang ada sehingga menjadi penyajian dan ceritera sejarah yang dapat dipercaya.³⁵ Sedangkan menurut Kuntowijoyo, metode sejarah ialah petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis tentang bahan, kritik, interpretasi, dan penyajian sejarah. Jadi, metode mempunyai hubungan dengan prosedur, proses atau teknis yang sistematis

³⁵ HNI Efqi. *Skripsi: Kebijakan Mangkunegara Iv Dalam Bidang Ekonomi Tahun 1853-1881 Dan Relevansi Hasil Penelitian Dalam Pembelajaran Ips Di Smp*, hal 39. Diakses melalui eprints.uns.ac.id/17960/4/BAB_III.pdf, pada tanggal 21 Oktober 2015, pukul 5.30 wib.

dalam penyelidikan suatu disiplin ilmu tertentu untuk mendapatkan objek (bahan-bahan) yang diteliti.³⁶

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ada dua macam, yaitu primer dan sekunder. Data primer adalah data yang langsung bersangkutan dengan permasalahan penelitian. Sedangkan data sekunder adalah data yang tidak secara langsung berhubungan dengan penelitian, namun menunjang penelitian untuk dilaksanakan.

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data didapatkan dari berbagai sumber yang telah ada. sumber-sumber tersebut seperti jurnal, buku, majalah, laporan, dan lain sebagainya.

3. Unit Analisis Data

Dengan melihat tema dan pokok permasalahan yang telah disusun, maka penulis menyusun unit analisa yang sesuai dengan pokok permasalahan tersebut. Melalui unit analisa data tersebut maka akan didapatkan sumber data yang tepat, sehingga penelitian akan disusun secara baik dan mendapatkan hasil yang baik pula. Unit analisis data dalam penelitian ini adalah kepemimpinan

³⁶ D. Rovis. *Macam-macam penelitian*. Diakses melalui https://www.academia.edu/9997151/Metodologi_Penelitian_Sosial, pada tanggal 13 September 2015, Pukul 13.00

pada masa Pemerintahan Soeharto dan Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, serta kebijakan pangan pada masa pemerintahan keduanya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Setelah sumber data didapatkan, maka tahap selanjutnya yang harus sangat diperhatikan adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data sendiri adalah proses atau cara bagi peneliti dalam melakukan pengumpulan data-data yang relevan bagi penelitiannya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik dokumentasi.

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data-data dari sumber-sumber yang berupa dokumentasi. Baik itu dokumentasi secara tulisan (Buku, jurnal, berita, internet, dll), lisan, maupun berupa gambar, dengan pertimbangan bahwa data-data tersebut relevan dengan permasalahan penelitian yang penulis ambil.

5. Teknik Analisa Data

Penelitian yang kaya tidak akan berarti sama sekali jika data tersebut tidak dirangkai dalam struktur makna yang baik.³⁷ Untuk itu kemudian dibutuhkan teknik analisa data, sehingga data-data dapat kemudian dirangkai dalam struktur makna yang baik.

³⁷ Dr. Agus Salim, MS. *Teori Dan Paradigma Penelitian Sosial*. Tiara Wacana, Yogyakarta, 2006, hal 20.

Teknik analisa data yang digunakan oleh penulis adalah teknik sekunder, karena data yang dibutuhkan didapatkan dari sumber-sumber sekunder. Seperti buku, jurnal ilmiah, internet dan sebagainya yang berhubungan dengan perbandingan kepemimpinan masa pemerintahan Soeharto dengan masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ditinjau dari aspek kebijakan pangan.

Adapun teknik analisa data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, antara lain:

a. Heuristik

Heuristik adalah pengumpulan seluruh data yang dianggap relevan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis. Data-data tersebut adalah data dari buku, jurnal ilmiah, majalah, laporan, berita, dan lain sebagainya.

b. Kritik dan Analisis Saran

Kritik dan analisis saran adalah proses mengkritisi sumber-sumber yang telah didapatkan dan dikumpulkan oleh peneliti. Kemudian sumber-sumber tersebut dipilih kembali, sehingga didapatkan sumber yang relevan bagi penelitian. Dalam proses ini, data-data yang ada disaring dan diambil yang validnya saja.

c. Interpretasi

Interpretasi adalah proses menafsirkan semua fakta-fakta yang telah diperoleh sebelumnya dengan mempertimbangkan data-

data yang ada. setelah itu, penulis menafsirkan fakta-fakta yang diterima tersebut selama penelitian dilakukan.

d. Historiografi

Setelah melakukan pengumpulan data, melakukan kritik dan analisis saran terhadap data, dan kemudian ditafsirkan, penulis kemudian menuangkan hasil penelitiannya tersebut dalam bentuk tulisan. Tulisan tersebut disajikan dengan gaya dan tata bahasa sederhana, dengan judul: Perbandingan Politik Pangan Pada Masa Kepemimpinan Soeharto Dan Susilo Bambang Yudhoyono.

H. Rencana Sistematika Bab

Rencana sistematika bab yang akan dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

a. Bab 1 Pendahuluan

Bab 1 pendahuluan adalah bab yang berisi tentang latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, definisi konseptual, metode penelitian serta rencana sistematika bab. Pada bab ini dijelaskan mengenai masalah yang akan diteliti oleh penulis disertai dengan rumusan permasalahan yang melatar belakangi dilakukannya penelitian. Sehingga, fokus penelitian yang akan dilakukan oleh penulis akan terlihat jelas.

Selain itu, penulis juga menyertakan tujuan serta manfaat penelitian sebagai bahan pertimbangan mengenai pentingnya penelitian ini. Baik itu untuk penulis ataupun untuk khalayak umum. Tinjauan pustaka disertakan pada bab ini untuk memperjelas teori yang berhubungan dengan fokus penelitian. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan definisi konseptual, yaitu pembahasan mengenai teori yang digunakan yang ditulis dengan bahasa penulis sendiri. Hal tersebut diperlukan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman penulis mengenai teori yang akan digunakan.

Penulis juga menyertakan metode penelitian yang digunakan, untuk memperjelas bagaimana kedepannya penelitian ini akan dilakukan. Di akhir pembahasan bab, terdapat rencana sistematika bab yang bertujuan untuk pedoman penyusunan penulisan skripsi.

b. Bab II Biografi dan pemikiran pangan Soeharto serta Susilo Bambang Yudhoyono

Pada bab ini akan dijelaskan sekilas mengenai biografi serta pemikiran-pemikiran Soeharto dan Susilo Bambang Yudhoyono mengenai pangan, yang dianggap relevan untuk mendukung penelitian.

c. Bab III Politik Pangan Pada Masa Kepemimpinan Soeharto dan Susilo Bambang Yudhoyono

Pada bab ini dijelaskan secara rinci mengenai hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penulis akan mendeskripsikan bagaimana perbandingan politik pangan pada masa pemerintahan Soeharto dan Susilo Bambang

Yudhoyono. Serta bagaimana pengaruh dari kepemimpinan keduanya terhadap berjalannya kebijakan pangan.

d. Bab IV Penutup

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Kesimpulan ini akan menjelaskan secara singkat mengenai rumusan permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu, pada bab ini akan disertakan saran. Saran tersebut adalah saran yang didapat setelah penelitian dilakukan yang ditujukan kepada pemerintahan selanjutnya mengenai politik pangan serta kepemimpinannya.